ARTIKEL

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2015

Oleh:

EVANY NOVA RINA

13.1.02.01.0096

Dibimbing oleh :

1. Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M., M.AK. CA

2. Dyah Nurdyawaty, S.e., M.SA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:Evany Nova Rina
NPM	:13.1.02.01.0096
Telepun/HP	:085736650120
Alamat Surel (Email)	:evanynova7@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jln. Kh. Achmad Dahlan No. 76 Kota Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 17 Agustus 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M., M.AK. CA 0713026101	Diah Nurdiwaty,S.E.,M.SA NIDN. 0728067201	Evany Nova Rina 13.1.02.01.0096

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2015

Evany Nova Rina
13.1.02.01.0096
Ekonomi - Akuntansi
evanynova7@gmail.com
Drs. Ec. Sugeng, Ak., M.M., M.AK. CA dan Dyah Nurdyawaty, S.e., M.SA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penlitian ini dilatarbelakangi karena adanya perubahan besar pada pola pemerintahan yang terbentuk oleh kebijakan otonomi daerah. Dimana adanya tuntutan pemerintah untuk lebih memaksimalkan pengelolaan pemerintahanya dalam mengelola potensi daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah lebih memiliki peran yang dominan dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan meningkatkan kapasitas fiskal. Salah satunya dengan memprioritaskan pendapatan asli daerah untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Permasalahan peneliti ini adalah (1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (4) Pnegaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal terhadap Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 37 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan *software SPSS for windows versi 23*. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan secara simultan menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

KATA KUNCI : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. LATAR BELAKANG

Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan kewenagan pemerintah daerah, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat daerah pemerintahan. Setiap daerah tersebut memiliki kewenangan fiskal, sebagaimana daerah harus dapat mengenali dan mengidentifikasi potensi sumber daya yang dimiliki, selain itu yang lebih diperlukan adalah daerah tersebut mampu menggali sumber keuangan sendiri untuk membiaya pembangunan dan pemerintahan pada masing-masing daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD sangatlah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal. oleh karenanya penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa kuat dan seberapa

besar pajak daerah, retribusi daerah serta belanja modal mempengaruhi PAD pada Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur. Provinsi jawa timur adalah salah satu provinsi dimana mempunyai posisi yang sangat strategis dalam aspek perekonomiannya. Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas ditambah dengan sumber daya fiskal yang tidak baik pada tingkatan kabupaten maupun kota yang jelas memiliki peluang sangat besar guna menstabilkan pendapatan asli daerah.

II. METODE

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 28 Kabupaten dan 9 Kota sejak tahun 2013-2015 . Sedangkan jumlah sampel yang dapat memenuhi kriteria yang ada dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 sampel yang terdiri dari 28 Kabupaten dan 9 Kota.

Jenis dan sumber data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2015 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Definisi dan pengukuran variabel pendapatan asli daerah

Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD = HPD + HRD + HPKDD + LPADS

Pajak daerah

pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

PD = PH + PR + PHb + PRk + PPJ + PMBLB + PP + PAT + PSBW + PBBPP + BPHTB

Retribusi daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan pemerintah kepada badan atau orang pribadi.

RD = RJUm + RJUs + RPT

Belanja modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan

BM = BT+BPM+BGB+BJIJ+BATL+BAL

satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	111	8428671	2738899423	151873063,48	405665341,738
Retribusi Daerah	111	4692465	537319754	38170628,56	61209401,421
Belanja Modal	111	59662488	2010585828	352161877,50	276964722,963
PAD	111	59333083	4035339014	321616816,59	551250819,842
Valid N (listwise)	111				

Sumber : *Output* SPSS 23

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dari penelitian ini sejumlah 111. Dari 111 sampel ini, Variabel PendapatanAsli Daerah (Y) memiliki nilai minimum Rp 59.333.083,- dan maksimum Rp 4.035.339.014,- sedangkan rata-rata sebesar Rp321.616.816,59 dengan standar deviasi Rp551.250.819,842. Variabel Pajak Daerah (X1) memiliki nilai minimum Rp 8.428.671,- dan maksimum Rp 2.738.899.423,- sedangkan rata-rata sebesar Rp 151.873.063,48 dengan standar deviasi Rp 405.665.341,738. Variabel Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai minimum Rp 46.92.465,- dan maksimum Rp 537.319.754,- sedangkan rata-rata sebesar Rp38.170.628,56 dengan standar deviasi Rp 61.209.401,421. Variabel Belanja Modal (X3) memiliki nilai minimum Rp 59.662.488,- dan maksimum Rp 2.010.585.828,- sedangkan rata-rata sebesar Rp352.161.877,50dengan standar deviasi Rp 551.250.819,842.

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,21787048
Most Extreme Differences	Absolute	,042
	Positive	,026
	Negative	-,042
Test Statistic		,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Uji Normalitas

Sumber : *Output* SPSS 23

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.8 besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,042 dan signifikan pada 0,200[c,d] dan nilainya lebih besar dari α= 0,05. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Uji Multikoliniearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,427	,706		3,438	,001		
PD	,425	,026	,640	16,040	,000	,452	2,214
RD	,199	,044	,197	4,519	,000	,378	2,648
BM	,295	,051	,224	5,741	,000	,473	2,114

Sumber: *Output SPSS 23*

Dari data tersebut diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal) nilainya kurang dari 10 dan tolerance yang nilainya lebih dari 0,1, dengan demikian dapat simpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji *Run Test*

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-,01386
Cases < Test Value	54
Cases >= Test Value	54
Total Cases	108
Number of Runs	56
Z	,193
Asymp. Sig. (2-tailed)	,847

Sumber: *Output SPSS 2*

Dari diatas, Hasil Uji *Run Test* diketahui bahwa nilai signifikansi berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,961[a]	,923	,921	,22090	1,711

Sumber: *Output SPSS 2*

Dalam tabel ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted* R- *Square*) sebesar 0,921. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen Terhadap variabel dependen sebesar 92,1% dan sisanya yaitu 7,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah output SPSS menunjukkan taraf signifikasi (0,000) < (0.05) dengan nilai positf pada angka 0,425. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Pajak Daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah output SPSS menunjukkan taraf signifikasi (0,000) < (0.05) dengan nilai positf pada angka 0,199. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima. Dalam penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Retribusi Daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengujian hipotesis 3 bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah output SPSS menunjukkan taraf signifikasi (0,000) < (0.05) dengan nilai positif pada angka 0,425. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima. Dalam penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Belanja Modal yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 2013-2014*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 2014-2015*. @ Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 2015-2016*. @Badan Pusat Statistik.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 7. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.

Hoesada,Jan. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* . Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nggilu, F., Sabijono, H. & Tirayoh, F. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.16, No.04, Hal.625

Noordiawan, Deddi. dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Noordiawan. Deddi. dkk. 2010. Edisi 2. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: FE Universitas Diponegoro.

Asteria, Beta. 2015. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kebupaten/Kota Di Jawa Tengah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 tentang *Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah*